



# LAPORAN INOVASI DAERAH

**Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang**

**Nomor Registrasi: 33.25-13951-43826-2021**

## 1. PROFIL INOVASI

### 1.1. Nama Inovasi

e-sakip

### 1.2. Dibuat Oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Batang ( setda.batang )

### 1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

### 1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

### 1.5. Jenis Inovasi

Digital

### 1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

### 1.7. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999. Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, asas - asas umum dalam penyelenggaraan negara yang baik meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Tindak lanjut dari Undang - Undang tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan masing - masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan kinerja yang disampaikan kepada atasan masing - masing, lembaga - lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan kinerja yang disusun tersebut harus dapat menggambarkan kinerja dari instansi pemerintah yang bersangkutan. SAKIP merupakan sebuah sistem yang meliputi perencanaan stratejik hingga pelaporan, pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mekanisme pelaporannya.

Selanjutnya sebagai bentuk operasional dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka untuk mempermudah mengimplementasikan SAKIP dalam penyusunan laporan kinerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja instansi pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Batang mengeluarkan aplikasi e- SAKIP. Aplikasi e - SAKIP memuat capaian - capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan perangkat daerah - perangkat daerah di bawahnya sesuai dengan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

### **1.9. Tujuan Inovasi Daerah**

Tujuan dari dibuatnya aplikasi e- SAKIP adalah sebagai perwujudan dari asas penyelenggaraan negara yang baik yaitu asas akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai tugas dan fungsinya masing - masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi yang dilaksanakan melalui tujuan, sasaran serta indikator dengan target kinerja yang terukur sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah masing - masing instansi. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip - prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber - sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- c. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus terorientasi pada pencapaian visi dan misi hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dengan aplikasi e-SAKIP yang memuat capaian - capaian kinerja yang telah diperjanjikan di Perjanjian kinerja

#### **1.10. Manfaat Yang Diperoleh**

Dengan adanya aplikasi e - SAKIP yang memuat capaian - capaian kinerja dari pemerintah daerah dan instansi - instansi pemerintah yang ada dibawahnya yang telah diperjanjikan di Perjanjian Kinerja memberi manfaat bagi para pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah, pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Aplikasi e - SAKIP memberikan informasi - informasi mengenai capaian - capaian dari masing - masing indikator yang ada di dokumen perencanaan sehingga dapat dilihat apakah pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan perencanaan dan telah mendapatkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Manfaat informasi yang ada di aplikasi e - SAKIP dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan bagi para pimpinan dan pembuat kebijakan dalam menentukan arah kebijakan dan arah pembangunan yang akan dicapai agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sedangkan bagi masyarakat informasi yang capaian kinerja yang ada pada aplikasi e - SAKIP dapat menjadi alat kontrol dalam menilai kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Dan apakah kebijakan dan program kegiatan tersebut telah dapat menciptakan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

#### **1.11. Hasil Inovasi**

Dengan adanya aplikasi e -SAKIP ini, hasil capaian kinerja dari Pemerintah Kabupaten Batang dan Perangkat - Perangkat Daerah di Kabupaten Batang dapat diakses dan dilihat oleh siapa saja. Dengan adanya aplikasi e - SAKIP penyampaian laporan hasil capaian kinerja lebih efektif dan efisien. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan oleh perangkat daerah akan lebih cepat tersampaikan dengan langsung mengisi hasil capaian kinerja dari masing - masing indikator pada aplikasi e-SAKIP. dan lebih menghemat kertas karena data tersampaikan dalam bentuk soft copy tidak perlu memerlukan anggaran cetak.

#### 1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

06-01-2019

#### 1.13. Waktu Implementasi

31-03-2020

#### 1.14. Anggaran

-

#### 1.15. Profil Bisnis -

#### 1.16. Kematangan

8.00

## 2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	sk bupati
2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3. Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4. Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5. Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7. Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia

9. Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10. Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11. Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13. Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15. Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16. Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
17. Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19. Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20. Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia